

**IMPLEMENTASI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
SEKOLAH DASAR: STUDI KOMPARATIF DI SDN 4 PENEHEL DAN SDN 1
BIAUNG**

Ayu Ketut Wiraswaryani¹, I Gede Made Ari Artana Nugraha²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana, Universitas
Pendidikan Ganesha, Indonesia

e-mail: ayuwiraswaryani@gmail.com¹, ariarta4488@gmail.com²

ABSTRACT

The standard of educators and education personnel is a main pillar in ensuring the quality of basic education. This study aims to analyze and compare the implementation of educator and education personnel standards at SDN 4 Penehel and SDN 1 Biaung, which are situated in semi-rural and rural areas of Penehel District, Tabanan Regency, Bali Province. The research method employed is descriptive qualitative with a comparative study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results indicate that normatively both schools have met the minimum academic qualifications (S1/D4) and all teachers possess educator certificates, fulfilling the requirements of Permendiknas No. 16 of 2007 and Government Regulation No. 57 of 2021. Substantively, teachers in both schools demonstrate adaptive pedagogical and professional competencies, particularly in integrating digital devices such as Interactive Flat Panel (IFP) and Chromebooks into the learning process based on the Merdeka Curriculum. The novelty of this study demonstrates that the quality of teachers' digital competence is not inherently dictated by the school's geographical location, but is more significantly driven by human resource readiness (human capital) and internal school support. However, structural challenges in the form of the absence of a definitive principal at one school, alongside the lack of computer laboratory facilities and specialized library personnel, remain systemic barriers to optimizing quality assurance in both institutions. This study recommends that the Tabanan District Education Office immediately intervene with structural policies to address these gaps.

Keywords: Educator Standards, Education Personnel, Digital Literacy, Comparative Study, Elementary School.

ABSTRAK

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan pilar utama dalam menjamin mutu pendidikan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan di SDN 4 Penebel dan SDN 1 Biaung yang berbasis di wilayah semi-perdesaan dan pedesaan Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kedua sekolah telah memenuhi kualifikasi akademik minimal (S1/D4) dan seluruh guru telah bersertifikat pendidik sesuai Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Secara substantif, guru di kedua sekolah menunjukkan kompetensi pedagogik dan profesional yang adaptif, khususnya dalam mengintegrasikan perangkat digital seperti Interactive Flat Panel (IFP) dan Chromebook dalam pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka. Novelty penelitian ini membuktikan bahwa kualitas kompetensi digital guru tidak selalu dipengaruhi oleh letak geografis sekolah, melainkan lebih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia (human capital) dan dukungan internal sekolah. Meskipun demikian, tantangan struktural berupa ketiadaan kepala sekolah definitif pada salah satu sekolah serta keterbatasan fasilitas laboratorium komputer dan tenaga pustakawan masih menjadi hambatan sistemik bagi optimalisasi penjaminan mutu di kedua sekolah. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan segera melakukan intervensi kebijakan struktural untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Kata Kunci: Standar Pendidik, Tenaga Kependidikan, Literasi Digital, Studi Komparatif, Sekolah Dasar.

A. Pendahuluan

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter, pengembangan kemampuan literasi dan numerasi, serta penanaman berbagai keterampilan abad ke-21 pada peserta didik. Pada tahap ini, proses transformasi kognitif dan afektif terjadi secara masif, sehingga menuntut adanya tata kelola satuan pendidikan yang prima. Dalam konteks penjaminan mutu internal,

keberadaan pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, tenaga administrasi, pustakawan) bertindak sebagai determinan utama yang menggerakkan seluruh komponen kurikulum. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah merumuskan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan minimal, di mana standar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan.

Tuntutan profesionalisme ini kian berlipat seiring dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pendekatan pembelajaran berdiferensiasi serta integrasi Profil Pelajar Pancasila. Guru abad ke-21 tidak hanya diwajibkan menguasai materi secara teoretis (content knowledge), tetapi juga harus piawai dalam mengadopsi teknologi informasi dalam ruang kelas melalui kerangka Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Kondisi ini sering kali memicu asumsi bahwa sekolah-sekolah yang berada di wilayah suburban atau rural (pedesaan) akan mengalami ketertinggalan kompetensi digital akibat keterbatasan akses informasi dan minimnya sarana prasarana fisik (physical capital).

Asumsi tersebut telah lama menjadi narasi dominan dalam literatur pendidikan Indonesia, di mana ketidakmerataan kualitas guru sering dikaitkan dengan dikotomi urban-rural. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Sanjaya (2016) dan Mulyasa (2018), menunjukkan adanya korelasi antara keterbatasan infrastruktur fisik dengan rendahnya adopsi teknologi dalam pembelajaran. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum sepenuhnya mengeksplorasi peran faktor internal sekolah, khususnya komitmen profesional guru dan iklim organisasi sekolah, sebagai variabel pemoderasi yang berpotensi mengubah dinamika tersebut secara fundamental.

Di sinilah letak kebaruan (novelty) dari penelitian ini. Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang cenderung mengaitkan rendahnya literasi digital guru dengan letak geografis pedesaan dan keterbatasan infrastruktur, penelitian ini menemukan sebuah anomali empiris yang signifikan. Hasil observasi dan wawancara mendalam di lapangan menunjukkan bahwa kualitas kompetensi digital guru tidak selalu dipengaruhi oleh letak geografis sekolah, tetapi lebih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia (human capital) dan dukungan internal sekolah. Penemuan

ini merekonstruksi paradigma lama dengan membuktikan bahwa keterbatasan fasilitas fisik tidak menjadi penghalang apabila terdapat komitmen profesional yang kuat dari para pendidik untuk beradaptasi.

Untuk menguji tesis tersebut secara mendalam, dilakukan studi komparatif di dua lokus, yaitu SD Negeri 4 Penebel yang mewakili karakteristik wilayah semi-perdesaan, dan SD Negeri 1 Biaung yang mewakili karakteristik wilayah pedesaan murni di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Pemilihan kedua lokus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya memiliki karakteristik geografis dan sosio-demografis yang berbeda namun berada dalam satu wilayah administratif yang sama, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis komparatif yang lebih kontrol dan sistemik.

Melalui analisis komparatif-sistemik ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika pemenuhan standar kualifikasi, realitas kompetensi pedagogik-profesional di lapangan, serta tantangan struktural-manajerial yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di wilayah rural dalam mempertahankan mutu pendidikan dasar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengambil kebijakan pendidikan, khususnya dalam merumuskan strategi peningkatan mutu pendidikan dasar yang lebih kontekstual dan berbasis bukti empiris.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif (*comparative study*), yang bertujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan keterkaitan sistemik dari dua situs penelitian yang memiliki karakteristik geografis berbeda. Paradigma interpretatif dipilih sebagai landasan epistemologi penelitian ini, karena fokus utamanya adalah memahami makna dan konteks di balik data yang diperoleh dari partisipan secara mendalam, bukan sekadar mengukur dan mengkuantifikasi fenomena. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell (2014), yang menekankan pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks dalam konteks naturalnya.

Lokasi penelitian bertempat di SD Negeri 4 Penebel (kategori semi-perdesaan) yang terletak di Desa Sunantaya, dan SD Negeri 1 Biaung (kategori pedesaan) yang terletak di Desa Biaung, di mana keduanya berada di bawah payung administratif Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Subjek dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang meliputi Kepala Sekolah SDN 4 Penebel, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah SDN 1 Biaung, guru-guru kelas, guru mata pelajaran (Agama Hindu dan PJOK), serta tenaga administrasi/operator sekolah dari masing-masing instansi. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan posisi yang relevan dengan topik penelitian.

Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, Observasi Partisipatif Pasif, yang dilakukan untuk mengamati secara langsung integrasi teknologi digital (IFP dan Chromebook) dalam kegiatan belajar mengajar di kelas serta memeriksa kondisi riil infrastruktur penunjang literasi. Peneliti berperan sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas pembelajaran, sehingga fenomena dapat diamati secara alami tanpa intervensi. Kedua, Wawancara Mendalam (In-depth Interview), yang dilaksanakan secara semi-terstruktur bersama para informan kunci untuk menggali data substantif mengenai kompetensi guru, latar belakang motivasi, kendala manajerial, serta dukungan internal sekolah. Ketiga, Studi Dokumentasi, yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen portofolio sekolah, data sertifikasi guru, status kepegawaian, dan profil kelengkapan tenaga kependidikan.

Keabsahan data dijaga ketat melalui teknik triangulasi sumber (membandingkan data dari guru, kepala sekolah, dan staf administrasi) serta triangulasi metode (menyilangkan hasil wawancara dengan bukti observasi lapangan dan dokumentasi). Triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang memiliki perspektif berbeda terhadap fenomena yang sama, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan obyektif. Member checking juga dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan pemahaman informan.

Proses analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang diadaptasi untuk studi komparatif, yang meliputi empat tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data (data collection), di mana seluruh data mentah dikumpulkan melalui ketiga teknik pengumpulan data yang telah disebutkan. Tahap kedua adalah reduksi data (data reduction), di mana data yang diperoleh dipilih, difokuskan, dan disederhanakan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap ketiga adalah penyajian data secara matriks komparatif (data display), di mana data yang telah direduksi disajikan dalam format yang memungkinkan dilakukannya perbandingan sistematis antara kedua lokus penelitian. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi akhir (conclusion drawing/verification), di mana interpretasi akhir dirumuskan berdasarkan pola-pola yang muncul dari analisis data secara keseluruhan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Pemenuhan Standar Normatif (Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi)

Berdasarkan investigasi dokumentasi dan verifikasi data ketenagaan, potret pemenuhan standar normatif pada aspek kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik di kedua lokus penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan regulasi yang sangat tinggi. Kedua sekolah secara normatif-administratif telah sukses melampaui ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal ini dapat dicermati pada matriks komparatif berikut:

Tabel 1. Matriks Komparatif Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Parameter Evaluasi	SD Negeri 4 Penebel	SD Negeri 1 Biaung
Kondisi Geografis	Semi-perdesaan (Lingkungan Agraris)	Pedesaan (Lingkungan Agraris)
Status Kepemimpinan	Kepala Sekolah Definitif (Ibu Sayu Nyoman Seriati, S.Pd)	Pelaksana Tugas/PLT (Bapak I Made Edy Aryana, S.Pd)
Kualifikasi Akademik Guru	100% Sarjana (S1) Kependidikan	100% Sarjana (S1) Kependidikan

Rasio Sertifikasi Pendidik	100% Guru Memiliki Sertifikat Pendidik	100% Guru Memiliki Sertifikat Pendidik
Status Kepegawaian	Didominasi Guru ASN	Kombinasi ASN dan Non-ASN
Tenaga Administrasi	1 Orang Operator Sekolah	1 Orang Tenaga Tata Usaha
Tenaga Pustakawan	Tidak Ada (Kosong)	Tidak Ada (Kosong)
Infrastruktur Praktik	Tidak ada Lab Komputer & Bahasa	Tidak ada Lab Komputer & Ruang Perpustakaan

Data di atas menunjukkan bahwa secara normatif-administratif, baik SDN 4 Penebel maupun SDN 1 Biaung telah sukses melampaui ambang batas minimal yang ditetapkan regulasi nasional. Seluruh tenaga pendidik (100%) di kedua instansi tersebut telah memegang sertifikat pendidik (professional certificate), yang merupakan bukti pengakuan legal negara atas kompetensi guru sebagai tenaga profesional.

Dalam kacamata teoritis, kepemilikan sertifikasi formal yang menyentuh angka 100% ini mengindikasikan bahwa kompetensi dasar guru—yang mencakup aspek pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian—telah melalui proses skrining, pelatihan, dan pengakuan legal oleh negara. Wilayah perdesaan Kecamatan Penebel terbukti tidak mengalami krisis kualitas legalitas guru. Kondisi ini menjadi modalitas fundamental atau human capital yang sangat berharga bagi sekolah untuk melejitkan mutu pembelajaran, karena hambatan klasik berupa guru tidak layak mengajar (unqualified teachers) sudah berhasil dieliminasi.

Pencapaian ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan sertifikasi guru yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2007 melalui program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program-program ini telah berhasil mendorong guru-guru di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di wilayah rural seperti Kecamatan Penebel, untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan mengikuti proses sertifikasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan guru untuk memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) dan memiliki sertifikat pendidik.

2. Eksplorasi Substantif Kompetensi Pedagogik dan Profesional: Rekonstruksi Paradigma Literasi Digital Rural

Ketika penelitian ini masuk ke dalam dimensi substantif di dalam ruang kelas, ditemukan fakta empiris yang sangat kuat untuk mendukung novelty penelitian ini. Di tengah keterbatasan geografis dan lingkungan yang bernuansa agraris—di mana mayoritas orang tua siswa berprofesi sebagai petani—para guru di kedua sekolah menunjukkan tingkat literasi digital dan adopsi teknologi yang sangat progresif. Temuan ini secara langsung menantang asumsi konvensional bahwa letak geografis pedesaan identik dengan ketertinggalan digital.

Di SDN 4 Penebel, proses pembelajaran telah diakselerasi dengan pemanfaatan perangkat Interactive Flat Panel (IFP) secara bergilir antar-kelas, serta pengintegrasian proyektor dan Chromebook sebagai media interaktif. Guru-guru terbukti cakap dalam menyusun perangkat ajar digital (seperti Modul Ajar dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP digital) serta mengoperasikan platform pembelajaran elektronik. Kemampuan ini tidak diperoleh secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses belajar mandiri yang terus-menerus dan dukungan dari kepala sekolah definitif yang aktif mendorong pengembangan profesionalisme guru.

Pemandangan serupa ditemukan di SDN 1 Biaung; meskipun status sekolah berada di wilayah pedesaan murni, guru-guru secara adaptif memanfaatkan fasilitas Chromebook dan IFP yang tersedia untuk menyajikan visualisasi pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka yang atraktif dan berpusat pada siswa (*student-centered learning*). Visi sekolah yang secara eksplisit menekankan pentingnya literasi IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) ternyata telah menginternalisasi nilai-nilai kompetensi digital sebagai bagian dari identitas profesional para guru di sekolah ini.

Temuan ini secara lugas memformulasikan tesis baru: kualitas kompetensi digital guru tidak selalu berkorelasi positif dengan letak geografis atau kemewahan sarana fisik sekolah, melainkan digerakkan oleh kesiapan kapasitas internal manusia (*human capital*) dan kultur adaptasi yang disuntikkan sekolah. Dalam perspektif teori TPACK (Mishra & Koehler, 2006), para guru di wilayah rural ini berhasil melakukan kompensasi teknologi: mereka menolak menyerah pada ketiadaan laboratorium komputer, dan memilih memaksimalkan perangkat mobile (Chromebook dan IFP) langsung ke dalam ruang kelas.

Dukungan iklim kerja, motivasi intrinsik untuk memajukan anak didik agar melek IPTEK, serta kemauan profesional untuk belajar mandiri secara kolektif menjadi variabel kunci yang mengalahkan hambatan geografis. Komunitas Belajar (Kombel) yang dibentuk di dalam dan antar sekolah turut berperan sebagai wadah berbagi pengetahuan dan praktik baik dalam pengintegrasian teknologi. Implementasi Standar Pendidik di kedua sekolah telah bergeser dari sekadar kepatuhan formalitas belaka (administrative compliance) menuju praktik pembelajaran transformatif berbasis teknologi (substantive practice).

3. Analisis Sistemik Keterkaitan Antar-Standar dan Tantangan Manajerial

Meskipun aspek pendidik (human capital) memperlihatkan performa yang luar biasa, analisis sistemik dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyingkap adanya ketidakseimbangan struktural yang akut, terutama pada interaksi antara Standar Pendidik, Standar Tenaga Kependidikan, dan Standar Sarana Prasarana. Ketidakseimbangan ini berpotensi menghambat tercapainya mutu pendidikan yang optimal, meskipun kapasitas individual guru sudah sangat baik.

a. Sinergi Negatif akibat Keterbatasan Sarana Fisik (Physical Capital)

Kedua sekolah mengalami defisit fasilitas yang serupa: ketiadaan laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan ketiadaan tenaga pustakawan profesional. Di SDN 4 Penebel, fasilitas literasi hanya mengandalkan ruang perpustakaan konvensional tanpa pengelola khusus. Sementara di SDN 1 Biaung, kondisinya lebih memprihatinkan karena sekolah tidak memiliki ruang perpustakaan sama sekali. Kondisi ini tentu menjadi ironi tersendiri di tengah semangat implementasi literasi yang didorong oleh Kurikulum Merdeka.

Ketiadaan infrastruktur ini menghambat optimalisasi Standar Proses dan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Kompetensi teknologi guru yang sudah sangat baik menjadi terpasung karena siswa tidak dapat melakukan eksperimen teknologi atau praktik komputasional secara terstruktur di laboratorium. Pengembangan literasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher-order thinking skills/HOTS) siswa menjadi kurang sistematis karena absennya layanan

perpustakaan yang dikelola secara profesional. Guru-guru harus berimprovisasi secara kreatif untuk menutupi kekurangan ini, yang pada akhirnya menambah beban kerja mereka di luar tugas pokok mengajar.

b. Dampak Stabilitas Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah

Perbedaan mendasar yang menjadi pemisah efektivitas tata kelola kedua sekolah terletak pada aspek manajemen kepemimpinan. SDN 4 Penebel menikmati stabilitas manajerial yang kokoh karena dikomandani oleh kepala sekolah definitif (Ibu Sayu Nyoman Seriati, S.Pd) dan didukung oleh soliditas formasi guru yang seluruhnya berstatus ASN. Kondisi ini mempermudah orkestrasi kebijakan, pembagian jadwal pemanfaatan IFP, serta perencanaan program kerja jangka panjang sekolah secara konsisten. Kepemimpinan yang stabil memberikan rasa aman dan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah dalam menjalankan tugas dan mengembangkan inovasi pembelajaran.

Sebaliknya, SDN 1 Biaung berada dalam posisi kerentanan manajerial. Sekolah ini dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas (PLT), Bapak I Made Edy Aryana, S.Pd, yang secara struktural mengemban beban ganda karena tugas pokoknya adalah sebagai guru PJOK. Berdasarkan teori manajemen pendidikan (Mulyasa, 2018), kepemimpinan seorang PLT memiliki keterbatasan ruang gerak dalam mengesekusi keputusan-keputusan strategis-finansial dan penggalangan modalitas eksternal. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan kewenangan dan kurangnya legitimasi formal yang diperlukan untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak jangka panjang.

Beban kerja yang tumpang tindih ini berpotensi memicu kelelahan manajerial (managerial burnout), yang dalam jangka panjang dapat mendegradasi konsistensi pengawasan akademik, menghambat tata kelola administrasi yang akuntabel, serta mengancam keberlanjutan iklim pengembangan kompetensi profesional guru yang sudah berjalan baik. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan untuk segera menempatkan kepala sekolah definitif guna menjamin stabilitas kepemimpinan dan efektivitas pengelolaan SDN 1 Biaung.

c. Implikasi terhadap Standar Kompetensi Lulusan dan Mutu Pembelajaran

Ketidakseimbangan antara kapasitas pendidik yang tinggi dengan keterbatasan sarana prasarana dan kerentanan kepemimpinan memiliki implikasi langsung terhadap pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Meskipun guru-guru di kedua sekolah telah berupaya maksimal dalam mengintegrasikan teknologi dan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, ketiadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium komputer dan perpustakaan yang terkelola dengan baik membatasi kedalaman dan keluasan pengalaman belajar yang dapat diberikan kepada siswa.

Penelitian ini juga menemukan bahwa para guru di kedua sekolah aktif memanfaatkan platform digital seperti Google Classroom, Canva for Education, dan berbagai aplikasi pembelajaran interaktif untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Inovasi ini dilakukan secara mandiri oleh para guru sebagai bentuk respons adaptif terhadap keterbatasan infrastruktur fisik. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan komitmen profesional guru merupakan aset yang tidak ternilai dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah dengan keterbatasan sumber daya.

D. Kesimpulan

Penelitian komparatif ini menghasilkan beberapa konklusi fundamental. Pertama, implementasi Standar Pendidik di SD Negeri 4 Penebel dan SD Negeri 1 Biaung telah terpenuhi dengan sangat unggul, baik pada tataran kualifikasi akademik formal (100% S1 Kependidikan bersertifikat pendidik) maupun pada penguasaan kompetensi pedagogik-profesional yang nyata di lapangan. Esensi kebaruan (novelty) dari studi ini memberikan kontribusi teoretis baru yang membuktikan secara empiris bahwa letak geografis pedesaan/semi-perdesaan tidak otomatis mendegradasi literasi digital guru.

Kedua, kehadiran komitmen profesional dan kekuatan human capital internal mampu menembus batasan geografis, terbukti dari kefasihan guru mengoperasikan IFP dan Chromebook dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Variabel yang paling menentukan kualitas kompetensi digital guru ternyata bukanlah aksesibilitas geografis, melainkan kesiapan sumber daya manusia dan iklim organisasi sekolah yang kondusif untuk belajar dan berinovasi.

Ketiga, efektivitas driving force dari guru yang kompeten ini terhambat oleh anomali sistemik berupa ketidakseimbangan dengan Standar Sarana Prasarana dan Standar Tenaga Kependidikan. Ketiadaan laboratorium komputer, ruang perpustakaan, tenaga pustakawan profesional, serta kerentanan status kepemimpinan PLT menjadi batu sandungan yang mereduksi dampak kualitas guru terhadap capaian kompetensi lulusan secara holistik.

Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan untuk segera memprioritaskan intervensi kebijakan struktural, yang meliputi: (1) penempatan kepala sekolah definitif di SDN 1 Biaung untuk menjamin stabilitas tata kelola dan efektivitas kepemimpinan instruksional; (2) pengadaan fasilitas laboratorium TIK sebagai pengungkit literasi digital siswa yang lebih terstruktur dan sistematis; (3) pemerataan formasi tenaga kependidikan (pustakawan dan staf administrasi) guna membebaskan guru dari beban kerja non-kependidikan sehingga dapat fokus pada tugas utamanya sebagai pendidik; dan (4) penyelenggaraan program pengembangan profesionalisme guru yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang pedagogi digital dan implementasi Kurikulum Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Kurikulum Merdeka dan Implementasinya dalam Pembelajaran*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
- Mulyasa, E. (2018). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sanjaya, W. (2016). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.